SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2018 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan, Road Map Reformasi Birokrasi berikutnya maka dipandang perlu melakukan pengawasan kembali tugas-tugas dan tanggung jawab pimpinan SKPD sesuai dengan tugas pokok masing-masing dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembagadan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BALANGAN TENTANGROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 2018-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
7. G*rand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. Road *Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan pedoman/arah bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh SKPD / Unit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan disusun untuk dilaksanakan selama 4 (empat) tahun yaitu Tahun 2018-2021.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi Road Map Reformasi Birokrasi yang merupakan tahapan atau aktifitas-aktifitas yang akan dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, indicator pencapaiannya, pelaksana, penanggungjawab dan anggaran yang diperlukan.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018-2021 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 – 2021

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Balangan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemeritahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu tahun 2018 dan 2021. *Road map* reformasi birokrasi untuk tiga tahun dengan visi dan misi yang tentunya mengacu pada kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan ini berisi hal-hal sebagai berikut :

a. uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Balangan saat ini;
b. kondisi yang diharapkan dalam dua tahun mendatang (kebutuhan/harapan pemangku kepentingan);
c. permasalahan yang dihadapi; serta
d. agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan program reformasi birokrasi tahun 2018-2021. Program reformasi birokrasi diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten, antara lain :

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat;
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, penyebaran informasi hukum secara online dan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin baik;
3. Penataan kelembagaan telah mengurangi tumpang tindih fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja;
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja semakin meningkat;
5. Pemerintah Kabupaten telah memiliki berbagai standar pelayanan termasuk telah menyediakan Mal Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian;
6. Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
7. Pengelolaan keuangan juga semakin meningkat (pengelolaan keuangan berbasis akrual);

8. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin meningkat dan akan terus dikembangkan;
9. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
10. Pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Banyak kemajuan dan hal-hal pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain :

1. Manajemen Perubahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten terkait mental aparatur atau pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) antara lain :

a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang belum optimal;
b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;
c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan output/outcome untuk kepentingan publik; dan
e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

2. Penguatan Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

3. Penguatan Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan SKPD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPD;
e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
f. Perlunya penyempurnaan casscading kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai

(level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas "siapa melakukan apa" terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;

g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD.

4. Penguatan Kelembagaan

Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain :

a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa SKPD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada SKPD yang tugas fungsinya tumpang tindih;

b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk :

   1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
   2. Mengukur jenjang organisasi;
   3. Kemungkinan duplikasi fungsi;
   4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain.

c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

5. Penguatan Tatalaksana

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain :

a. Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

c. Belum optimalnya pengembangan e-government, antara lain :
   1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;
   2. Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
   3. Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara online);
d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

6. Pengauatan Sistem Manajemen SDM-ASN

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain :

a. Penyusunan formasi belum didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja;
b. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
c. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;
d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
e. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
f. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
g. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan; dan
h. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal; i. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain :

a. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati;
b. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;

8. Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain :

a. Belum adanya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik;
b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;
c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

C. Kondisi yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten, maka pada tahun 2018-2021 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokasi;

2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online);
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat ditingkatkan dari CC menjadi BB;
11. Menngkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2018-2021 adalah Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja. Sedangkan sasarannya adalah :

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

b. Birokrasi yang efektif dan efisien;

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

2. Area Perubahan, Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2018-2021, sebagai berikut :

Tabel 3.1

8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
2.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3.	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
4.	Penguatan Kelembagaan	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
5.	Penguatan Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
6.	Pengauatan Sistem Manajemen SDM-ASN	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

7.	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
8.	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Tabel 3.2
Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No.	Program	Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	- Penguatan tim reformasi birokrasi - Penyusunan road map reformasi birokrasi - Peningkatan sosialisasi /internalisasi road map reformasi birokrasi kepada SKPD/unit kerja dan pegawai - Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur - Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Dapat terwujud budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat
2.	Penguatan Pengawasan	- Melaksanakan kebijakan gratifikasi - Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat - Merencanakan dan melaksanakan whistle blowing system	Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan

		- Merencanakan dan melaksanakan penanganan benturan kepentingan - Pembangunan zona integritas - Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
3.	Penguatan Akuntabilitas	- Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/ pengukuran kinerja) - Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja (peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, reviu indikator kinerja utama, penyusunan indikator kinerja individu yang berkualitas berbasis elektronik, membangun dan mengembangkan penyusunan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik, membangun aplikasi casscading kinerja/pohon kinerja)	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua SKPD, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan SKPD mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari CC menjadi BB
4.	Penguatan Kelembagaan	- Melakukan evaluasi organisasi/kelembagaan - Melakukan penataan organisasi/kelembagaan	Kelembagaan/ organisasi berbasis kinerja (performance based organization), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih

			efektif dan efisien.
5.	Penguatan Tatalaksana	- Peningkatan proses bisnis / Standard Operating Procedure (SOP) khususnya bidang pelayanan - Pengembangan e-government - Peningkatan keterbukaan informasi publik - Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government
6.	Pengauatan Sistem Manajemen SDM-ASN	- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi - Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme - Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka khususnya eselon II - Penetapan dan pengukuran kinerja individu - Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai - Penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan - Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian	Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.
7.	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	- Melakukan harmonisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi)	Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada

		- Peningkatan sistem dan tidak tumpang tindih pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah - Penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan lainnya	publik, harmonis dan tidak tumpang tindih
8.	Pelayanan Publik	- Menerapan standar pelayanan (memaklumatkan standar pelayanan, perbaikan Standard Operating Procedure (SOP/review standar pelayanan) - Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi/pelatihan, mempermudah akses layanan, pemberlakuan sanksi/reward bagi pelaksana pelayanan, peningkatan pengelolaan Mal Pelayanan Publik, peningkatan inovasi pelayanan) - Meningkatkan pengelolaan pengaduan (Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan, pemantapan/pengintegrasi an sistem pelayanan pengaduan secara manual dan online, evaluasi penanganan pengaduan) - Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (survey tingkat kepuasan masyarakat secara berkala)	Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

		- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi/penilaian terhadap kinerja pelayanan publik)	
9.	Quick Wins Reformasi Birokrasi	- Menyusun rumusan quick wins reformasi birokrasi - Menetapkan dan melaksanakan quick wins reformasi birokrasi - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick wins reformasi birokrasi	Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri SKPD/Unit Pelayanan dalam melakukan langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilakukan setiap tahun sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.

C. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim PMPRB setiap tahun sekali. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018 – 2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan. Dokumen ini akan bermanfaat jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan unsur-unsur organisasinya untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan 2018 – 2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah memuat langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya penting untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individu pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, satuan kerja perangkat daerah dan unit-unit organisasinya harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya berkelanjutan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh ketekunan, kerja keras dan penuh semangat. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Balangan harus terus dibangun melalui pelayanan yang terus lebih baik dan memuaskan masyarakat dalam sebuah tata pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi kebaikan bersama pemerintah dan seluruh masyarakat Balangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA

KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target		Tahapan	Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
1	**Manajemen Perubahan**																	
	1																	
	1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Road Map RB	Tersusunnya PMPRB hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Road Map RB	a	Pembentukan tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Road Map RB													Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Rp. 66,410,000.00
		1 dokumen	b	Pengumpulan bahan dan data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Road Map Rb														
			c	Pembahasan dan penyusuna tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi														
			d	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													
2	**Penguatan Pengawasan**																	
	1 **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**																	
	1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam memahami peraturan dan perundang-undangan	a	Penyusunan rencana kegiatan Bimtek dengan disesuaikan pagu anggaran yang tersedia													Inspektorat	Rp. 280,000,000.00
			b	Evaluasi pelaksanaan kegiatan														
			c	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													

PARAF KASUBBAG PARAF KABAG

No	Program/Kegiatan	Indikator Target		Tahapan	Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
	2 Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
	1) Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Tercapainya LHKSN dan tata kelola keuangan	a	Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan													Inspektorat	Rp. 76,450,000.00
			b	monitoring pelaksanaan kegiatan														
			c	pengumpulan data														
			d	Evaluasi capaian kinerja dan keuangan														
			e	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan														
			g	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													
	3 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																	
	1) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal	Tercapainya Pengawasan internal dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	a	Klasifikasi jenis temuan													Inspektorat	Rp. 79,900,000.00
			b	monitoring LHP ke Obrik														
			c	pengumpulan data hasil tindak lanjut														
			d	penandatangan berita acara penyelesaian LHP														
			g	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													
	2) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal	Tercapainyan tindak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal	a	Klasifikasi jenis temuan													Inspektorat	Rp. 111,500,000.00
			b	monitoring LHP ke Obrik														
			c	pengumpulan data hasil tindak lanjut														
			d	penandatangan berita acara penyelesaian LHP														
			g	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target		Tahapan	Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
	4 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur																	
	1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tercapainya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	a	Penyusunan rencana kegiatan Bimtek dengan disesuaikan pagu anggaran yang tersedia													Inspektorat	Rp. 492,450,000.00
			b	Evaluasi pelaksanaan kegiatan														
			g	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													
	5 Program Pembinaan manajemen Pemerintahan Kabupaten/Daerah																	
	1) Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah (Pemeriksaan kasus/khusus)	Tertanganinya/terselesainya kasus	a	Persiapan													Inspektorat	Rp. 313,450,000.00
			b	Pengumpulan data														
			c	Pemerikasaan/wawancara														
			d	Klarifkasi														
			e	LHP														
			f	Monitoring														
			g	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													
	2) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terbentuknya TIM (3 TIM)	a	Rapat pembentukan Tim unit pengaduan khusus penganan pengaduan masyarakat													Inspektorat	Rp. 140,320,000.00
			b	Rapat kerja internal tim														
			c	pelaksanaan kegiatan penangana pengaduan														
			d	monitoring capaian hasil penanganan														
			e	penyusunan laporan hasil capaian penanganan pengaduan masyarakat														
			f	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target		Tahapan	Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
	6 Program peningkatan kapabilitas APIP																	
	1) Penilaian mandiri kapabilitas APIP	Terbentuknya TIM Penilai	a	Pengumpulan data													Inspektorat	Rp. 97,175,000.00
			b	pemenuhan instrumen kelengkapan data dukung														
			c	self assement														
			d	pengajuan hasil self assesment ke BPKP Perwakilan Kalsel														
			e	QA BPKP Pusat														
			f	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													
	2) Pembinaan dan penilain SPIP	Terbentuknya satgas SPIP	a	Identifikasi risiko SKPD													Inspektorat	Rp. 44,825,000.00
			b	Penetuan peta Risiko														
			c	FGD dengan Auditan														
			d	Self Assesment hasil penilaian														
			e	QA BPKP Pusat														
			g	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													
3	**Penguatan Akuntabilitas**																	
	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
	1) Penyusunan RKPD	Dokumen hasil Rancangan Awal RKPD (Murni dan Perubahan)	a	Penyusunan tim penyusun RKPD													BAPPEDA dan Seluruh SKPD serta Unsur Terkait Perencanaan	Rp. 333,620,000.00
		2 dokumen	b	Penyusunan dokumen Draf Rancangan Awal RKPD														
			c	Permintaan Pokok-pokok Pikiran DPRD terkait Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD														
			d	Penlaksanaan Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal RKPD														
			d	Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
			e	Penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Bupati														
			f	Penyampaian Surat Edaran Bupati kepada SKPD beserta Rancangan Awal RKPD untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD														
			g	Pembahasan dokumen Rancangan Awal Renja SKPD														
	2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD T.A. 2020	a	Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan													BAPPEDA dan Seluruh SKPD serta Unsur Terkait Perencanaan	Rp. 126,550,000.00
		2 Kegiatan	b	Pembentukan Tim Kompilasi Musrenbang RKPD														
			c	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan														
			d	Penyusunan Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan														
			e	Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD (Pra Musrenbang RKPD) untuk Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD														
			f	Penguumpulan Bahan dan Data Dukung Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten														
			g	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten														
			h	Penyusunan Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
	3) Penetapan RKPD	Dokumen Rancangan Akhir RKPD (Murni dan Perubahan)	a	Penyusunan tim penetapan RKPD													BAPPEDA dan Seluruh SKPD serta Unsur Terkait Perencanaan	Rp. 114,510,000.00
		2 dokumen	b	Penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD														
			c	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dibahas bersama SKPD														
			d	Penyampaian Rancangan Perkada RKPD Kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk dilakukan Fasilitasi Penyempurnaan Rancangan Perkada RKPD														
			e	Pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan Perkada RKPD berdasarkan Hasil Faslitasi oleh Bappeda Provinsi														
			f	Penyampaian Hasil Penyempurnaan Perkada RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan														
			g	Penyampaian Perkada RKPD kepada SKPD untuk Penyempurnaan Perumusan Rancangan Akhir Renja SKPD														
			h	Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
			i	Penyampaian Hasil Verifikasi Racangan Akhir Renja SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPD														
			j	Pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD berdasarkan Hasil Verifikasi oleh Bappeda														
			k	Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD yang sudah disempurnakan berdasarkan Hasil Verifikasi ke Bappeda														
			l	Penyampaian Rancangan Akhir Renja SKPD oleh Bappeda kepada Bupati melalui melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada														
			m	Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD berdasarkan Perkada Renja SKPD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)														
	4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Tersusunnya pelaporan pelaksanaan APBD & DAK Kab. Balangan	a	Pembentukan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD & DAK Kab. Balangan													BAPPEDA dan Seluruh SKPD serta Unsur Terkait Perencanaan	Rp. 287,700,000.00
		2 dokumen	b	Pengumpulan bahan dan data laporan secara berkala														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target		Tahapan	Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
			c	Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan														
			d	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala														
			e	Pembahasan dan penyusuna rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi														
			f	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													
	2 Program Peningkatan Kinerja dan Revitalisasi Otonomi Daerah																	
	1) Penyusunan Laporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Balangan	a	Pembentukan tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Balangan													Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dan Seluruh SKPD	Rp. 210,580,000.00
		1 dokumen	b	Pengumpulan bahan dan data Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Balangan														
			c	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Balangan														
			d	Penyampaian Laporan Kinerja (LKj)														
	2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SAKIP	Tersusunnya reviu hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SAKIP	a	Pembentukan tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SAKIP													Sekretariat Darah (Bagian Organisasi) dan Seluruh SKPD	Rp. 365,060,000.00
		1 dokumen	b	Pengumpulan bahan dan data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SAKIP														
			c	Pembahasan dan penyusuna tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			d	Tindak lanjut hasil evaluasi	2020													

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target		Tahapan	Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
4	**Kelembagaan**																	
1	**Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah**																	
	1) Pembentukan atau Perubahan Organisasi Perangkat Daerah	Pembentukan atau perubahan organisasi perangkat daerah yang difasilitasi tepat ukuran dan fungsi	a	Perencanaan pembentukan/perubahan organisasi perangkat daearah													Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Rp. 120,400,000.00
		100%	b	Penyusunan konsep pembentukan atau perubahan organisasi perangkat daerah														
			c	Pembahasan Tim dan SKPD														
			d	Penyampaian Raperda pembentukan/perubahan organisasi perangkat daerah kepada Bupati dan DPRD														
			e	Pembahasan Raperda bersama pihak legislatif (DPRD)														
			f	Fasilitasi oleh Gubernur/Pemerintah Provinsi														
			g	Penetapan pembentukan/perubahan organisasi perangkat daerah oleh DPRD dan Bupati														
			h	Distribusi Peraturan Daerah														
	2) Penyusunan Uraian Tugas	Tersedianya uraian tugas organisasi perangkat daerah (SKPD) sesuai pedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku	a	Penyusunan Konsep Uraian Tugas SKPD														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
		10 Dokumen	b	Kajian Tim dan SKPD terhadap konsep uraian tugas													Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Rp. 101,305,000.00
			c	Rapat Tim dan SKPD membahas konsep uraian tugas														
			d	Penyampaian konsep uraian tugas kepada Bupati melalui Bagian Hukum														
			e	Penetapan uraian tugas SKPD melalui Peraturan Bupati														
			f	Distribusi Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas														
	3) Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	SKPD terpantau pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai pedoman ketentuan yang berlaku	a	Persiapan terkait penentuan latar belakang, tujuan dan metode pemantauan													Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Rp. 26,510,000.00
		10 SKPD	b	Penyusunan kuesioner atau bahan pengumpulan data dan informasi														
			c	Pengumpulan data ke SKPD dan informasi														
			d	Pengolahan dan analisis data														
			e	Penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah														
			f	Penyampaian laporan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah														

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan		Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Terlaksananya evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	a	Persiapan pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
		100%	b	Pengumpulan kelengkapan informasi/data pendukung pengisian Kuesioner Evaluasi Kelembagaan														
			c	Pengisian Kuesioner Evaluasi Kelembagaan dan analisis data														
			d	Tim menyampaikan laporan evaluasi kepada pihak berwenang (Kementerian PAN dan RB)														
5	**Penataan Tatalaksana**																	
	1 Program Fasilitasi Bidang Infrastruktur TIK																	
	1) Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur E-Government	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Infrastruktur E-Government SKPD	a	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Menara SST Penunjang Pembangunan Jaringan SKPD													Diskominfo (Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government))	Rp. 175,000.00
		75%	b	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jaringan Koneksi SKPD														
			c	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Comand Center dan Data Center, Desain Ruangan/Gedung + Desain Perangkat														
	2) Pengadaan Manajemen Bandwidth	Tersedianya Jaringan Koneksi Internet Kecamatan	a	Pengadaan Jaringan Koneksi Internet (Paringin-Paringin Selatan)													Diskominfo (Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government))	Rp. 850,000,000.00
		7 Desa	b	Pengadaan Jaringan Koneksi Internet Desa Binjai														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			c	Pengadaan Jaringan Koneksi Internet Desa Auh														
			d	Pengadaan Jaringan Koneksi Internet Desa Ajung														
			e	Pengadaan Jaringan Koneksi Internet Desa Tebing Tinggi														
			f	Pengadaan Jaringan Koneksi Internet Desa Dayak Pitap														
			g	Pengadaan Jaringan Koneksi Internet Desa Simpang Bumbuan														
			h	Pembangunan Tower/Pemancar Jaringan Internet Ds. Puyun RT 1 dan 2														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target		Tahapan	Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
	2 Program Pembangunan Layanan E-GOVERMENT																	
	1) Sosialisasi Admin Aplikasi SKPD	Tata Kelola e-Gov (admin dan regulasi)	a	sosialisasi bagi admin dan informasi regulasi bagi SKPD													Diskominfo (Bidang Layanan e-Gov)	Rp. 100,350,000.00
	2) Penyediaan Layanan Aplikasi Kepemerintahan	Jasa Konsultansi Perencanaan e-gov	b	Jasa Konsultansi Perencanaan pihak III													Diskominfo (Bidang Layanan e-Gov)	
	3 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa																	
	1) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Artikel Informasi Berita tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	a	Kegiatan Rutin Pengelolaan Informasi berupa artikel berita dan foto kegiatan yang diunggah di website resmi Pemerintah Kabupaten Balangan													Diskominfo (Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik	Rp. 24,950,000.00
		100 Artikel																
	2) Pengelolaan Data Informasi Publik	Jumlah Informasi berita dan Foto tentang Pemerintah Kabupaten Balangan yang tayang di infopublik.ic Kementrian Kominfo RI	a.	Peliputan dan dokumentasi kegiatan													Diskominfo (Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik)	Rp. 101,250,000.00
			b.	Pengolahan Informasi hasil liputan														
		650 Artikel	c.	Pengiriman Berita Kegiatan ke redaksi infopublik.id														
		150 Foto	d.	Pengiriman Foto Kegiatan ke redaksi infopublik.id														
	4 Program Pengelolaan Aspirasi Publik																	

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
	1) Pelayanan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Aspirasi Publik	a.	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aspirasi Publik													Diskominfo (Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik)	Rp. 21,150,000.00
		15 buku	b.	Pelayanan Aspirasi Publik														
			c.	Penyusunan Dokumen Aspirasi Publik														
5	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**																	
	1) Operasional PPID	Jumlah Kegiatan Operasional PPID	a.	Sosialisasi tentang PPID													Diskominfo (Bidang Pengembangan Komunikasi Publik)	Rp. 113,985,000.00
			b.	Cetak Buku Informasi dan Dokumentasi														

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target		Tahapan	Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
6	**Pengauatan Sistem Manajemen SDM-ASN**																	
	1 **Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur**																	
	1) Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Ditindaklanjutinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	a	Laporan dan identifikasi Kasus Disiplin													BKPPD	Rp. 53,950,000.00
		4 Kasus	b	Pemeriksaan														
			c	Rapat Tim dan SKPD membahas Kasus Pelanggaran Disiplin														
			d	Tindak Lanjut Hasil Rapat														
	2 **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**																	
	1) Penataan Jabatan dan SDM Aparatur	Terisinya jabatan dengan Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan SKPD	a	Penetapan PNS/Pejabat yang memenuhi syarat untuk mengikuti assesment													BKPPD	Rp. 487,299,000.00
			b	Pelaksanaan assesment bekerjasama dengan lembaga yang kredibel														
			c	Analisis hasil assesment oleh Tim Pansel														
			d	Penyampaian hasil analisis Tim Pansel kepada Pejabat Pembina Kepegawaian														
7	**Penguatan Peraturan Perundang-Undangan**																	
	1 **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**																	
	1) Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan untuk mendukung pelaksnaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat di daerah Kab. Balangan	a	Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah intern eksekutif														

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan		Bulan												Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1 Peraturan Daerah	b	Penyampaian rancangan Peraturan Daerah ke DPRD melalui Bagian Hukum													Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) dan Dinas Kesehatan	Rp. -
			c	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama pihak legislatif														
			d	Penetapan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan														
			e	Persiapan tindak lanjut														
			f	Implementasi	2019													

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
	2) Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SOP Perizinan	Jumlah Peraturan Bupati untuk pelaksanaan SOP Bidang Perizinan bagi masyarakat di daerah Kab. Balangan	a	Penyusunan konsep Peraturan Bupati tindak lanjut Perbup SOP Perizinan													Bagian Hukum dan Dinas PMPTSP	Rp. -
			b	Pembahasan konsep Peraturan Bupati														
			c	Penyampaian konsep Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Bagian Hukum														
			d	d. Penetapan Peraturan Bupati														
			e	Implementasi	2019													
	3) Penataan peraturan perundang-undangan di Bidang Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum daerah yang siap di sebarluaskan kepada masyarakat	a	Penyusunan Produk Hukum yang siap untuk disebarluaskan kepada masyarakat													Bagian Hukum	Rp. -
		3 Peraturan Bupati	b	input data-data produk hukum kabupaten balangan untuk di masukan dalam website kabupaten Balangan www.jdih.balangankab.go.id														
			c	Penyampaian laporan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke Biro Hukum Propinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HaM RI														
8	**Pelayanan Publik**																	
1	**Program Peningkatan Pelayanan Publik**																	

No	Program/Kegiatan	Indikator / Target	Tahapan		Bulan 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penanggungjawab/ SKPD Terkait	Anggaran
	1) Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersedianya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah dan Kabupaten	a	Pembentukan tim penyusun laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM)													Setda Bagian Organisasi	Rp. 77,750,000
		2 dokumen	b	Pengumpulan bahan dan data hasil survei kepuasan masyarakat														
			c	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)														
				Penyampaian Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)														

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN